



Strategi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam Melakukan pengurangan Risiko Bencana Banjir

Wahib Assyahri¹, Febi Afni Milda², Iis Elfa Syafmaini³, Oktaviaroza⁴

¹ Fakultas Sosial, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Bukittinggi

^{2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang

*Corresponding author, e-mail: wahibassyahri@umnyarsi.ac.id

Abstract

South Solok Regency is surrounded by mountains and is fed by 13 rivers. With such natural landscapes, South Solok Regency is prone to flooding and the impact is felt by the community. Hence, the government needs to take measures in the form of disaster risk reduction. But nature does disaster risk reduction problems often occur which result in efforts to reduce disaster risk not maximally. So the purpose of this study is to describe the disaster risk reduction strategies implemented by the government and the factors that influence the government in reducing disaster risk. The research method used is a qualitative approach with descriptive techniques and analysis techniques using SWOT analysis. The results found are first that the district government has not optimally implemented disaster risk reduction due to insufficient budget and lack of facilities and infrastructure. Second, community participation is lacking in disaster risk reduction activities. The three communities do not protect the surrounding environment. So the government should use a strategy, first asking for financial assistance from the central and provincial governments. In addition, the business world should also provide grants to district governments to optimize disaster risk reduction activities and complete inadequate facilities and infrastructure. Second, approaching the community by visiting their homes so that the community can actively participate in disaster risk reduction. The three governments make regulations on protecting the environment.

Keywords: Strategy; disaster; disaster risk reduction

Received November 17, 2020 Revised March 22, 2022 Published April 30, 2022



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Indonesia mempunyai 5.000 sungai besar dan kecil yang tersebar disemua provinsi dan kabupaten. Namun tidak semua sungai dikelola dengan baik oleh pemerintah. Ketika hujan terjadi berjam-jam dengan intensitas yang tinggi sungai-sungai tersebut berpotensi terjadinya banjir. Oleh sebab itu, Indonesia Negara yang rawan terhadap bencana, terutama bencana banjir. Sari, A. A., Sabilla, A. A., & Hertati, D. (2020) bencana adalah peristiwa yang mengacaukan kehidupan masyarakat sehingga masyarakat mengalami kerugian, kehilangan harta bencana, kerusakan serta dampak psikologis yang diakibatkan oleh keadaan alam, non alam dan perbuatan manusia. Banjir merupakan bencana yang terjadi ketika keadaan alam sudah tidak seimbang. Ada beberapa provinsi dan kabupaten yang hampir tiap tahun mengalami banjir salah satunya Kabupaten Solok Selatan. Keadaan alam Solok Selatan dikelilingi oleh bukit-bukit dan dilalui oleh 18 aliran sungai.

Dengan kondisi alam Kabupaten Solok Selatan dikelilingi bukit dan dialirai oleh banyak sungai, sehingga jadi daerah yang rawan terhadap banjir. Jika pemerintah tidak melakukan tindakan tepat dan cepat akan banyak kerugian yang dialami baik oleh masyarakat maupun pemerintah yang disebabkan oleh banjir. Banjir itu sendiri ialah bencana alam yang terjadi ketika intensitas hujan meningkat dalam waktu berjam-jam yang membuat debit sungai meningkat sehingga sungai tidak mampu menampung airnya mengakibatkan melimpah ke pemukiman masyarakat. Penyebab banjir yang lain ialah dari perbuatan manusia seperti,

membuang sampah ke sungai, melakukan penebangan liar serta merusak hulu sungai (Mahardika, D., & Setianingsih, E. L., 2018).

Rachmat, A. R., & Pamungkas, A. (2014) bencana banjir tidak dapat diprediksi kapan terjadinya, oleh karena itu pemerintah perlu menanggulangi resiko bencana banjir tersebut agar dapat mengurangi kerugian dan dampak setelah banjir. Dalam penanggulangan bencana banjir pemerintah tidak dapat bergerak sendiri, tetapi harus menggandeng masyarakat dan pihak swasta. Hal ini juga didukung dengan realita yang terjadi bahwa Kabupaten Solok Selatan masih rentan terhadap bencana banjir, namun dari bentuk pengurangan resiko bencana yang telah dilakukan masih kurang. Berikut rekapitulasi kerusakan yang diakibatkan oleh banjir tahun 2019.

Tabel 1. Rekapitulasi Kerusakan Akibat Bnjr Tahun 2019

Nomor	Lokasi	Bentuk Kerusakan
1.	Sapan Salak	Mesjid Sekolah Rumah Sawah
2.	Sungai Pangkuah	Jembatan
3.	Kandang Baniah	Rumah Sawah
4.	Kampung Teramdani	Rumah
5.	Liki	Mesjid Jalan Rumah
6.	Manggiu	Jalan

Akibat dari bencana banjir tersebut sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat dan psikologinya, sehingga memerlukan penanggulangan bencana dalam bentuk pengurangan resiko bencana agar dapat mengurangi resiko dibidang ekonomi, lingkungan bahkan pembangunan. Pengurangan resiko bencana dilakukan dengan prosedur yang berurutan untuk mengalis penyebab bencana dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana agar memperbaiki kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pemerintah dalam penanggulangan resiko bencana tidak hanya mencatat warga yang terkena dampak banjir saja, tetapi juga dapat menyalurkan bantuan tanggap darurat dalam melakukan pendataan dan pemerintah juga harus menyikapinya dalam kegiatan pengurangan resiko bencana sesuai dengan Peraturan Provinsi Sumatera Barat No. 5 Tahun 2007 pasal 33 ayat 2 berupa:

1. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
2. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
3. Pengembangan budaya sadar bencana;

4. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
5. Penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

BM Faturahman (2017) Pengurangan resiko bencana bertujuan untuk dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan saat terjadi bencana maupun sesudah terjadinya bencana. Pengurangan resiko bencana dilakukan sebelum terjadinya bencana, yang tertera dalam Peraturan Provinsi Sumatera Barat No. 5 Tahun 2007 “Kegiatan pengurangan resiko bencana dilakukan agar dapat meminimalisir kerugian yang akan ditimbulkan ketika terjadi bencana, kegiatan ini dilakukan saat tidak terjadi bencana atau saat pra bencana”. oleh sebab itu, pemerintah wajib berperan aktif dalam pengurangan resiko bencana tersebut.

A Masyhuri, dkk. (2021) Masyarakat dalam pengurangan resiko bencana dijadikan subyek agar dapat mengelola dan menekan resiko terjadinya bencana. Sedangkan pemerintah menjadikan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas dalam penanggulangan bencana. Begitu juga Pemerintah Solok Selatan melalui BPBD melakukan beberapa program pengurangan resiko berupa sosialisasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat dan sekolah, membentuk kelompok siaga bencana setiap nagari, melakukan pelatihan terhadap tim reaksi cepat bencana, dan mengadakan forum pengurangan resiko bencana.

Nisa, F. (2014) dalam melakukan kegiatan pengurangan resiko bencana sering kali terjadi permasalahan yang mengakibatkan pengurangan resiko bencana kurang maksimal. Pertama, masalah yang terjadi seperti masyarakat tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah setempat dan pencegahan yang belum permanen. Kedua, saat bencana pemerintah kekurangan peralatan dan perlengkapan dikerenakan ada yang rusak dan anggaran yang dimiliki tidak memadai juga tanggap darurat yaitu kegiatan untuk meringankan penderitaan seperti bantuan darurat dan pengungsian. Yang ketiga setelah terjadi bencana pada saat melakukan kegiatan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Solok Selatan dituntut dapat memberikan solusi untuk memecahkan masalah ini.

Dari pemaparan diatas pemerintah perlu menentukan strategi yang bagus dan menarik dalam melakukan pengurangan resiko bencana. Mengambil dari penjabar diatas, penulis menjadi termotivasi untuk melaksanakan penelitian dengan judul ” Strategi Pemerintah dalam Melakukan Pengurangan Resiko Bencana di Kabupaten Solok Selatan”.

Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (2013) analisis SWOT merupakan cara yang dilakukan untuk mempergunakan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities) yang dimiliki oleh organisasi dengan mengurangi menekan kekurangan (weaknesses) dan ancaman (threats) secara bersamaan. Analisis SWOT ialah teknik pengkajian yang dilakukan pada kondisi internal dan kondisi eksternal. Lakosa, F. Y. (2019) kondisi internal yaitu kekuatan dan peluang, kekuatan ialah kelebihan yang dimiliki oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Sedangkan peluang adalah keadaan yang menguntungkan organisasi agar memudahkan untuk mencapai tujuan. Faktor eksternal yaitu kelemahan dan ancaman, kelemahan ialah kekurangan yang dimiliki oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Sedangkan ancaman ialah permasalahan yang dihadapi oleh organisasi dalam mencapai tujuan (Valentino Turnip, E. S., & Alhadi, Z, 2019).

Tabel 2. Analisis SWOT

faktor internal	Kekuatan (Strengths-S)	Kelemahan (Weaknesses-W)
Faktor eksternal		
Peluang (Opportunities-O)	Strategi SO	Strategi WO
Ancaman	Strategi ST	Strategi WT

(Threats-T)		
-------------	--	--

Berdasarkan tabel diatas dapat perhatikan bahwa strategi SO memberdayakan kemampuan dengan mengukur keuntungan, WO memberdayakan kekurangan dan memperhatikan untung, ST adalah memberdayakan kemampuan dan melihat ancaman, WT memberdayakan kekurangan dan melihat ancaman.

Konsep Manajemen Bencana

Manajemen bencana merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, masyarakat secara berkesinambungan yang dilaksanakan mulai ketika sebelum terjadi bencana sampai setelah terjadi bencana. Menurut Sadisun (dalam Alhadi 2014), manajemen bencana ialah tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menyesuaikan keadaan sekitar dan berkesinambungan yang dilaksanakan semenjak sebelum bencana, ketika terjadi bencana hingga setelah terjadinya bencana.

Tujuan dari manajemen bencana adalah agar mengurangi kerugian harta benda maupun korban jiwa saat terjadinya bencana. Oleh sebab itu manajemen bencana sangat perlu agar saat bencana terjadi secara tiba-tiba masyarakat tahu langkah-langkah yang harus dilakukan dan tidak mengalami kepanikan.

Tabel 3. Tahap-tahap manajemen bencana

Sebelum Bencana	Saat Bencana Terjadi	Sesudah bencana
Pencegaha	Peringatan dini	Pemulihan
Mitigasi	Penyelamatan dan pencarian	Konsolidasi
Kesiapsiagaan	Pengungsian	Rekonstruksi
		Rehabilitasi

Konsep Pengurangan Resiko Bencana

Pengurangan resiko bencana adalah proses yang dilakukan secara terencana pada pra bencana bertujuan untuk meminimalisir dampak resiko dari bencana. Dalam United Nations-International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR 2006), Pengurangan Resiko Bencana adalah kegiatan memberdayakan peserta didik secara terencana untuk pengurangan resiko bencana yang dilakukan dalam proses pembelajaran agar dapat membangun budaya aman serta tangguh bencana. Nurjanah dkk, (2013) menjelaskan pengurangan resiko bencana merupakan suatu paradigma yang berfokus kepada, analis resiko bencana, ancaman, kerentanan dan kemampuan masyarakat. Kegiatan pengurangan resiko bencana dilakukan pada tahap pra bencana, kegiatan ini bertujuan agar faktor-faktor penyebab bencana dapat diketahui dan ditanggulangi agar resiko dari bencana dapat diminimalisir. Objek dalam pengurangan resiko bencana adalah masyarakat (W Adiyoso, 2018).

Dalam penelitian ini, penulis tertarik menggunakan teori analisis SWOT karena teori analisis SWOT bisa melihat kelemahan-kelemahan yang dimiliki organisasi sehingga mampu melakukan penguatan dengan menciptakan strategi baru. Kemudian analisis SWOT juga dapat melihat peluang yang dimiliki oleh organisasi agar bermanfaat untuk mencapai tujuan juga dapat melihat ancaman dari luar sehingga organisasi bisa mempersiapkan strategi untuk menghadapi ancaman tersebut.

Metode

Metode yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian ialah metode kualitatif deskriptif. Pengambilan data dengan wawancara dilakukan dari Tanggal 14 September 2020 sampai 9 Oktober 2020. Data yang didapatkan berupa peta daerah yang rawan terhadap banjir, serta kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam melakukan pengurangan resiko bencana banjir. Untuk menentukan informan, penulis melakukannya dengan cara *purposive sampling*. Informan penulis ialah PLT Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Solok Selatan, Kasi Kesra Camat Sungai Pagu, Camat KPGD, Wali Nagari Pakan Rabaa Timur, Sekretaris Nagari Pasar Muaralabuh Ketua KSB Nagari Pakan Rabaa Timur, Ketua KSB Nagari Pasar Muaralabuh, Sekretaris DPRD Kabupaten Solok Selatan, dan Masyarakat. Untuk lokasi penelitian penulis melakukan nya di Kantor BPBD Kabupaten Solok Selatan, Kantor Camat Koto Parik Gadang Diateh, Kantor Camat Sungai Pagu, Kantor Wali Nagari Pakan Rabaa Timur, Wali Nagari Pasar Muaralabuh. Untuk proses analisis datanya penulis melakukan dengan cara pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian, memilah data yang diperlukan dengan menggolongkannya, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, analisis SWOT (Lakosa, F. Y, 2019; Valentino Turnip, E. S., & Alhadi, Z, 2019; Rangkuti, 2013) digunakan untuk mengidentifikasi empat faktor utama yang mempengaruhi kinerja pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam melakukan pengurangan resiko bencana pada Nagari Pakan Rabaa Timur dan Nagari Pasar Muaralabuh di kabupaten solok selatan. Empat faktor utama tersebut meliputi :

a. Kekuatan

Kekuatan adalah keuntungan yang dimiliki organisasi dalam mencapai tujuan. Strengths atau kekuatan organisasi BPBD dilihat dari internal BPBD itu sendiri dalam melakukan pengurangan resiko bencana pada Nagari Pakan Rabaa Timur dan Nagari Pasar Muaralabuh di Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan hasil temuan penulis, kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah melakukan pengurangan resiko bencana adalah pertama BPBD memiliki personil atau SDM yang memadai dan sudah terlatih. Terbukti dengan program kerja BPBD Kabupaten Solok Selatan yang setiap tahun memberikan pelatihan kepada anggota tentang tanggap darurat bencana. Kedua BPBD mempunyai kelompok siaga bencana atau disingkat menjadi KSB yang membantu BPBD dalam melakukan pengurangan resiko bencana. KSB merupakan perpanjangan tangan BPBD dalam melakukan pengurangan resiko bencana. Anggota KSB diberikan pelatihan oleh BPBD untuk dapat membimbing masyarakat, memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk kegiatan pengurangan resiko bencana. Ketiga BPBD membentuk destana yaitu desa yang tangguh dan memiliki kekuatan dalam menghadapi bencana sehingga ketika bencana terjadi desa tersebut mampu memulihkan dampak bencana dengan cepat. Destana Saat ini tiga nagari yang sudah menjadi desatana, yaitu Nagari Pasir Talang, Nagari Koto Bari dan Nagari Pulakek Koto Baru. Keempat BPBD memiliki pedoman yang menjadi acuan melakukan pengurangan resiko bencana, berupa peraturan kepala BNPB No 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

b. Kelemahan

Kelemahan diartikan sebagai kekurangan yang berasal dari internal pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam melakukan pengurangan resiko bencana. Kekurangan tersebut perlu ditangani dengan baik agar tidak menghambat dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan temuan penulis, kekurangan pemerintah dalam melakukan pengurangan resiko bencana banjir pada beberapa nagari di Kabupaten Solok Selatan adalah pemerintah kekurangan anggaran dana dalam pelaksanaan pengurangan resiko bencana sehingga untuk mitigasi struktural belum terlaksana secara permanen sehingga pengurangan resiko bencana banjir belum efektif. Dalam melakukan pengurangan resiko bencana ada dua mitigasi yang dapat dilakukan yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural berupa

membangun dam tinggi atau tanggul sepanjang aliran sungai, melakukan pengalihan aliran sungai. Sedangkan mitigasi non struktural berupa memberikan pelatihandan penyuluhan kepada masyarakat. Saat ini Nagari Pakan Rabaa Timur dan Pasar Muaralabuh belum terlaksana secara menyeluruh sehingga mitigasi non struktural untuk mengurangi resiko bencana tidak berdampak. Kedua, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD kurang lengkap karena kekurangan anggaran dana. Sarana dan prasarana merupakan faktor yang penting dalam melakukan pengurangan resiko bencana. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan masih minim, ketika beberapa nagari mengalami bencana banjir secara bersamaan sarana dan prasarana harus didatangkan dari pemerintah provinsi untuk menutupi kekurangan pemerintah kabupaten. Ketiga kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan pelatihan penanggulangan bencana masih kurang dan masyarakat masih kurang menjaga lingkungan. Dalam melakukan pengurangan resiko bencana masyarakat merupakan subyek agar dapat mengelola dan menekan resiko terjadinya bencana. Tetapi masyarakat tidak peduli dengan perannya sebagai subyek, masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam kegiatan pengurangan resiko bencana.

c. Peluang

Peluang ialah kesempatan yang menguntungkan bagi organisasi dalam melakukan kegiatan pengurangan resiko bencana untuk mencapai tujuan yang berasal dari luar organisasi. Peluang pemerintah melakukan pengurangan resiko bencana banjir adalah pertama pemerintah Kabupaten Solok Selatan memperoleh dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pengurangan resiko bencana merupakan program dari pemerintah pusat melalui BNPB pusat. Jadi ketika pemerintah kabupaten melakukan pengurangan resiko bencana pemerintah pusat dan provinsi akan memberikan dukungan baik berupa materil maupun moril. Kedua BPBD menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah lain yang terkait untuk membantu pelaksanaan PRB agar efektif. Dan yang terakhir BPBD berpeluang menjalin kerjasama dengan dunia usaha. Kegiatan pengurangan resiko bencana tidak hanya dilakukan oleh BPBD tetapi juga dilakukan oleh instansi terkait seperti PMI. Jadi dengan ada beberapa instansi melakukan pengurangan resiko bencana BPBD dapat saling bekerja sama dengan instansi tersebut.

d. Ancaman

Ancaman ialah kendala atau permasalahan yang datang dari luar organisasi dan dapat menghambat organisasi dalam mencapai tujuan. Ancaman tidak dapat dianggap sepele harus segera dicari solusi agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai dengan baik.

Dari hasil penelitian ditemukan ancaman pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam melakukan pengurangan resiko bencana pada yaitu kondisi geografis Solok Selatan yang dikelilingi bukit-bukit dan dialiri oleh 13 aliran sungai besar. Juga terdapat nagari yang memiliki pertemuan dua sungai.

Berikut analisis SWOT Pengurangan Resiko Bencana Banjir pada Nagari Pakan Rabaa Timur dan Nagari Pasar Muaralabuh di Kabupaten Solok Selatan.

Tabel 4. Analisa SWOT dalam melakukan PRB pada Nagari Pakan Rabaa Timur dan Pasar Muaralabuh

Kekuatan/ <i>Strengths</i> (S)	Kelemahan / <i>Weaknesses</i> (W)
<ol style="list-style-type: none"> Memiliki personil yang telah terlatih dan siap turun kelapangan Memiliki kelompok siaga bencana Memiliki desa tangguh bencana Memiliki peraturan kepala BNPB No. 1 tahun 2012 tentang pedoman umum desa/kelurahan tangguh bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Anggaran dana untuk pengurangan resiko bencana kurang Sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah kurang memadai Kurangnya partisipasi masyarakat mengikuti pelatihan penanggulangan

	bencana dan masyarakat kurang menjaga lingkungan
Peluang / <i>Opportunities</i> (O)	Ancaman / <i>Threats</i> (T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi 2. Adanya menjalin kerjasama dengan dunia usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah Solok Selatan dikelilingi oleh bukit-bukit 2. Banyaknya aliran sungai di Solok Selatan

Dari matrik diatas dapat dicarikan solusi untuk menghadapi kendala yang ditemui pemerintah dalam melakukan pengurangan resiko bencana pada Nagari Pakan Rabaa Timur dan Nagari Pasar Muaralabuh di Kabupaten Solok Selatan. Strategi atau upaya merupakan serangkaian usaha untuk meningkatkan mutu kinerja dan kualitas individu maupun organisasi dalam mencapai tujuan. Untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dalam melakukan pengurangan resiko bencana pada beberapa nagari di Kabupaten Solok Selatan maka perlu adanya upaya sehingga tujuan dari pengurangan resiko bencana dapat dicapai dengan baik.

Berikut strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi resiko bencana berdasarkan analisis SWOT .

Tabel 5. Strategi pemerintah dalam melakukan PRB banjir pada Nagari Pakan Rabaa Timur dan Nagari Pasar Muaralabuh di Kabupaten Solok Selatan

	Kekuatan / <i>Strengths</i> (S)	Kelemahan / <i>Weaknesses</i> (W)
Peluang / <i>Opportunities</i> (O)	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalkan dan tingkatkan kualitas kinerja anggota agar kemampuan anggota dalam penanggulangan bencana meningkat 2. Optimalkan kinerja kelompok siaga bencana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat 3. Tingkatkan kemandirian desa tangguh bencana untuk melakukan pemulihan pasca bencana 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta bantuan anggaran dana ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan dunia usaha 2. Melengkapi sarana dan prasarana melalui kerjasama dengan dunia usaha juga memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada serta memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak 3. Melakukan pelatihan dengan unik dan mengajak masyarakat untuk gotong royong menjaga lingkungan

Ancaman / Treats (T)	Strategi ST 1. Optimalkan potensi kelompok siaga bencana dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat 2. KSB bekerja sama dengan nagari dan membuat peraturan tentang menjaga lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga lingkungan	Strategi WT 1. Manfaatkan anggaran untuk kegiatan yang dapat mengurangi banjir di daerah yang rawan banjir terlebih dahulu dan lakukan secara periodik 2. Memberi dam yang tinggi di tepi sungai
----------------------	---	--

Dari matriks di atas dapat disimpulkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kendala dalam melakukan pengurangan resiko bencana pada beberapa nagari di Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas kinerja anggota dalam melakukan penanggulangan bencana pemerintah dapat memperbanyak pelatihan yang diberikan kepada anggota untuk mengasah kemampuan anggota dalam melakukan penanggulangan bencana.
2. Setiap nagari memiliki KSB pemerintah dapat menggerakkan KSB untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara yang unik dan mudah dipahami masyarakat. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan *dor to dor* ke rumah masyarakat.
3. Solok Selatan baru memiliki tiga nagari destana, dengan tiga nagari tersebut pemerintah dapat memberikan contoh kepada nagari lain untuk dapat memulihkan nagari sendiri pasca bencana banjir.
4. Anggaran dana dari pemerintah kabupaten tidak mencukupi untuk melakukan pengurangan resiko bencana, untuk menutupi kekurangan pemerintah dapat mengajukan anggaran pengurangan resiko bencana pada anggaran pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
5. Pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan dunia usaha untuk melengkapi sarana dan prasarana pengurangan resiko bencana serta untuk membantu kekurangan anggaran pemerintah.
6. Daerah Solok Selatan yang secara geografis dikelilingi bukit serta dialiri oleh 13 sungai sanga mengancam pengurnagan resiko bencana yang dilakukan oleh pemerintah. Strategi yang dapat dilakukan pemerintah adalah memfokuskan kegiatan pengurangan resiko banjir bencana kepada daerah yang rawan terhadap bencana banjir.
7. Sungai-sungai yang diperkirakan akan elimpah ketika hujan dalam jangka waktu lama dengan intensitas tinggi pemerintah dapat memberi dam yang tinggi di tepi tepi sungai agar dapat menampung deit air.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aji, A, 2015; Sari, A. A., Sabilla, A. A., & Hertati, D, 2020; Nisa, F, 2014; Hermon, D, 2012) diperlukan proses manajemen yang baik dalam kesiapan penanggulangan bencana melalui analisis akan potensi dan resiko. Strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam melakukan pengurangan resiko becana di Kabupaten Solok Selatan adalah meminta bantuan dana kepada pemerintah pusat maupun provinsi serta adanya hibah dari dunia usaha agar pelaksanaan pengurangan resiko bencana efektif. Selain itu anggota kelompok siaga bencana melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menghimbau masyarakat untuk aktif dalam kegiatan pengurangan resiko bencana. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada daerah yang rawan terdapat

banjir dan dapat melakukan kegiatan pengurangan resiko bencana di daerah tersebut terlebih dahulu.

Simpulan

Dilihat dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam melakukan pengurangan resiko bencana banjir dapat disimpulkan bahwan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah adalah memiliki personil yang terlatih dan siap turun kapan saja kelapangan, memiliki kelompok siaga bencana, memiliki destana, memiliki Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012. Kelemahan yang ada adalah anggaran dana untuk pengurangan resiko bencana kurang, sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah kurang memadai. Peluang yang dimiliki pemerintah adalah pemerintah pusat dan provinsi memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten dan adanya menjalin kerjasama dengan dunia usaha. Dan yang ancaman yang didapatkan oleh pemerintah adalah partisipasi masyarakat kurang dalam mengikuti kegiatan pengurangan resiko bencana serta masyarakat kurang menjaga lingkungan.

Kepustakaan

- Adiyoso, W. (2018). *Manajemen Bencana: Pengantar dan Isu-Isu Strategis*. Bumi Aksara.
- Aji, A. (2015). Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Banjir bandang di kecamatan welahan kabupaten jepara. *Indonesian Journal of Conservation*, 4(1).
- Alhadi, Z. (2014). Kesiapan Jalur Dan Lokasi Evakuasi Publik Menghadapi Resiko Bencana Gempa Dan Tsunami Di Kota Padang (Studi Manajemen Bencana). *Humanus*, 13(1), 35-44.
- Faturahman, B. M. (2017). Reformasi Administrasi Dalam Manajemen Bencana. *Mimbar Yustitia*, 1(2), 185-201.
- Fauzani, M., Akramiah, N., & Sutikno, B. (2018). Analisis Swot dalam Penentuan Strategi Pemasaran Produk PT. Karunia Sentosa Plastik. *Jurnal EMA*, 3(2).
- Hermon, D. (2012). *Mitigasi Bencana Hidrometeorologi: Banjir, Lonsor, Ekologi, Degradasi Lahan, Puting Beliung, Kekeringan* (pp. 1-266). UNP Press.
- Mahardika, D., & Setianingsih, E. L. (2018). Manajemen Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Banjir di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 502-518.
- Masyhuri, A., Purnaweni, H., Herawati, A. R., & Priyadi, B. P. (2021). Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 854-862.
- Nisa, F. (2014). Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Jombang. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 2(2), 103-116.
- Nurjanah, S. R., Dede, K., & Siswanto, B. P. (2013). Adikoesoemo. *Manajemen Bencana. II. Bandung: Alfabeta.*
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.*

- Prastowo, A. (2011). Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian. *Jogjakarta: Ar-ruzz media*
- Rangkuti, F. (2013). *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, A. A., Sabilla, A. A., & Hertati, D. (2020). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik. *Syntax*, 2(5).
- Tantri, E. (2016). Manajemen Dan Pengurangan Risiko Bencana Di Tiongkok: Gempa Sichuan 2008. *Jurnal Kajian Wilayah*, 7(1), 45-58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.*
- Valentino Turnip, E. S., & Alhadi, Z. (2019). Analisis SWOT Terhadap Kapabilitas BPBD Kota Padang Dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 2(3), 166-171.